

## Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

### *Contribution and Effectiveness of Advertising Tax on Regional Original Revenue of Tidore City, North Maluku Province*

Jundi Amiruddin Pradana<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup>, Victorina Z Tirayoh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

Email: [Jundikakarse@gmail.com](mailto:Jundikakarse@gmail.com)

**Abstrak:** Pajak daerah merupakan sumber penghasilan utama pemerintahan daerah, dimana Pajak reklame menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah untuk membantu berjalannya pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bahwa pajak reklame cukup efektif dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: *Pajak Daerah, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah.*

**Abstract:** Local taxes are the main source of income for local government, where the Billboard Tax becomes part of the Local Revenue to help the government run. The study aims to measure the effectiveness and contribution of billboard taxes to the native income of the city area of Tidore Islands. The type of research used qualitative descriptive, data collection method using documentation. From the results of research conducted at the Regional Revenue Agency of Tidore Islands City that the billboard tax is quite effective in contributing to the Regional Native Income.

**Keywords:** *Local Tax, Billboard Tax, Local Original Income.*

## PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di suatu daerah kemampuan pemerintah dalam memungut pajak merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi (R, Kobandaha., Heinze R. N. 2016). Pemerintah Daerah perlu untuk meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

Kemajuan ekonomi di daerah tentunya dapat dilihat dari penerimaan daerah itu sendiri salah satunya melalui pendapatan asli daerah. Jika suatu daerah memiliki penerimaan daerah yang besar tentunya hal tersebut dapat membuktikan bahwa sumber daya yang ada di daerah tersebut telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi dan diharapkan mampu menjadi salah satu sumber anggaran untuk pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat, seperti digunakan untuk membangun fasilitas umum dan membiayai kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan yang positif (J, Manderos., I, Elim., L, Mawikere. 2019).

Untuk mendanai suatu kegiatan pemerintahan daerah, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan melakukan penerimaan yang efektif dan meningkatkan penerimaan pajak daerah, misalnya melalui subjek atau objek pendapatan pajak daerah untuk meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah (PAD). karena salah satu sumber dari PAD yaitu berasal dari pajak daerah (Wahyuni, E. T., Verawaty. 2019).

Pendapatan Asli Daerah bersal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak reklame mempunyai potensi yang besar, mengingat presentase pajak reklame adalah 25% sehingga pajak reklame mempunyai peranan penting dalam peningkatan PAD Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu kota di Provinsi Maluku Utara, Indonesia, kota ini memiliki luas wilayah 1.550.37 km<sup>2</sup> yang menjadikannya kota

terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangkaraya dan Kota Dumai. Dengan melihat Kota Tidore sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia maka penelitian yang akan dibahas adalah pajak reklame.

### 1.1 Akuntansi

(Soemarso 2015;3) *Accounting Association* menyatakan Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut.

### 1.2 Akuntansi Perpajakan

Irsan lubis (2015:2). Akuntansi pajak merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Didalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *Stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

### 1.3 Pengertian Pajak Daerah

Definisi pajak daerah menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 1.4 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah dan tarif pajak daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
  - b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
  - e) Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
  - a) Pajak Hotel 10%
  - b) Pajak Restoran 10%
  - c) Pajak Hiburan 35%
  - d) Pajak Reklame 25%
  - e) Pajak Penerangan Jalan 10%
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
  - g) Pajak Parkir 30%
  - h) Pajak Air Tanah 20%
  - i) Pajak Sarang Burung Walet 10%
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

### 1.5 Pajak Reklame

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012 ,tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan Reklame.

- a. Objek Pajak
  - 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
  - 2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi:
    - a) reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya.

- b) reklame kain.
- c) reklame melekat, stiker.
- d) Reklame Selebaran
- e) Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan
- f) Reklame Udara
- g) Reklame Apung
- h) Reklame Film/Slide

**1.6 Kontribusi**

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko 2013:2).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Kontribusi adalah sumbangan. sedangkan pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.'

Menurut Depdagri kriteria kontribusi dalam presentasi kriteria kinerja keuangan dibagi menjadi lima Kriteria yaitu: Sangat Kurang (SK), Kurang (K), Sedang (S), Cukup Baik (CB), Baik (B), Sangat Baik (SB). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

Presentase Kontribusi	Tingkat Kontribusi
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

**1.7 Efektivitas**

Rahardjo (2011:170) mengatakan efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, suatu hasil jika hasil tersebut benar-benar dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam M Faud Ramli (2016:140), Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Beliau juga menyebutkan bahwa, kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal satu (1) atau seratus (100) persen, berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi rasio yang diperoleh dari suatu jenis pungutan, maka semakin efektif kemampuan daerah dalam merealisasikan target yang telah direncanakan terhadap hasil yang diperoleh.

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan penerimaan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Berikut ini persentase dan tingkat kriteria efektivitas. ). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

### **1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Merujuk Pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-rundangan.

### **1.9 Penelitian Terdahulu**

Pinkan Grace Assa (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017), bertujuan Untuk Menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Sulawesi Utara. Hasil penelitian telah menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD.

Thressa Resita Pangerapan (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara, bertujuan untuk mengetahui Efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Utara dan .Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian Telah menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel di kabupaten Halmahera Utara.

Christian Ferdinand Majampoh (2018) dalam penelitian yang berjudul Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD kota Bitung. Hasil penelitian Pajak restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah kota bitung.

Ratu Inggri (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Utara, bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di sulawesi utara. Hasil penelitian Telah mengetahui penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di sulawesi utara.

Ni Luh Putu Anggraini (2018) dalam penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Hasil penelitian untuk mengetahui Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran pada PAD Kota Tomohon. Hasil penelitian Telah mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap PAD Kota Tomohon.

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif Deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Studi kasus dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan sedangkan studi Pustaka dengan mengumpulkan data mengidentifikasi sistem penerapan Pajak Reklame di Kota Tidore Kepulauan.

### **2.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 12 Januari 2021 sampai selesai.

### **2.3 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014-2018, dan data Kualitatif berupa gambaran objek penelitian.

### **2.4 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam bentuk dokumentasi berupa : Laporan tahunan realisasi pajak reklame, laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah, dan laporan pajak daerah.

## 2.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berupa data primer

## 2.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data

## 2.7 Metode dan Proses Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni analisis kontribusi dan efektivitas pajak reklame terhadap PAD.

## 2.8 Proses Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan proses menyusun dan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil Dokumentasi dengan pihak terkait, dengan mengorganisasi data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Gambaran Umum Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu Daerah otonom yang dimekarkan dari kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan pembentukan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264). Yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003.

Secara Geografis, letak wilayah Kota Tidore Kepulauan berada pada batas astronomis  $0^{\circ}$ - $20^{\circ}$  lintang utara dan pada posisi  $127^{\circ}$ - $127,45^{\circ}$  Bagian Timur. Kota Tidore memiliki total luas Wilayah  $1.550,37 \text{ Km}^2$  Dengan daratan  $9.116,36 \text{ Km}^2$  dan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Halmahera Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate. Sebelah barat berbatasan dengan laut Maluku secara Administratif, Kota Tidore Kepulauan Terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan dan 72 Desa/Kelurahan di mana Kecamatan Oba Tengah dengan Ibukota Akelamo adalah merupakan wilayah terluas ( $424,00 \text{ Km}^2$ ) dengan jumlah penduduk 7.659 jiwa dan kepadatan penduduk di Kecamatan ini adalah 18, sedangkan Kecamatan Tidore Timur dengan ibukota Tosa sebagai wilayah terkecil yaitu seluas  $34,00 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk 7.667 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 225.

### 3.2 Hasil Penelitian

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Reklame Kota Tidore Kepulauan dapat dilihat dari Target dan Realisasi pajak Reklame Kota Tidore dalam tahun Anggaran 2014-2018 yang telah diperoleh peneliti dari Kantor Badan Pendapatan Daerah dalam Bentuk Dokumentasi

**Tabel 3.**  
**Realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Target Pajak Reklame**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	Target Pajak Reklame
2014	82.457.242	115.000.000
2015	98.224.625	115.000.000
2016	134.537.670	115.000.000
2017	111.331.250	130.000.000
2018	106.539.500	130.000.000

Sumber: Laporan Realisasi badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan

**Tabel 4.**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan PAD**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	PAD (Pendapatan Asli Daerah)
2014	82.457.242	27.490.512.835
2015	98.224.625	33.302.408.650
2016	134.537.670	38.803.609.821
2017	111.331.250	51.238.088.954
2018	106.539.500	57.203.074.821

Sumber: Laporan Realisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan

Setelah mengetahui data tentang Pajak Reklame yang sudah tersaji pada tabel, kemudian penulis menganalisis Kontribusi penerimaan Pajak Reklame dengan menggunakan Rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

1. tahun 2014 =  $\frac{82.457.242}{27.490.512.835} \times 100\% = 29,99\%$
2. tahun 2015 =  $\frac{98.224.625}{33.302.408.650} \times 100\% = 29,49\%$
3. tahun 2016 =  $\frac{134.537.670}{38.803.609.821} \times 100\% = 34,67\%$
4. tahun 2017 =  $\frac{111.331.250}{51.238.088.954} \times 100\% = 21,72\%$
5. tahun 2018 =  $\frac{106.539.500}{57.203.074.821} \times 100\% = 18,62\%$

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014-2018 dimasukkan kedalam tabel Kontribusi Pajak Reklame.

**Tabel 5.**  
**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan 2014-2018**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Bentuk Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)(bentuk Rupiah)	Kontribusi	Tingkat Kontribusi
2014	82.457.242	27.490.512.835	29,99%	Sedang
2015	98.224.625	33.302.408.650	29,49%	Sedang
2016	134.537.670	38.803.609.821	34,67%	Cukup Baik
2017	111.131.250	51.238.088.954	34,67%	Cukup Baik
2018	106.539.500	57.203.074.821	18,62%	Kurang

Sumber: Hasil olahan data 2021

Artinya Kontribusi Pajak Reklame Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014-2018 Terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami Peningkatan walaupun hanya kecil kontribusinya tetapi sangat bermanfaat bagi pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang sementara ini sedang membangun daerah dengan kontribusi pajak reklame walaupun relatif masih kecil tetapi sangat menopang untuk pembangunan Daerah.

Artinya Kontribusi Pajak Reklame Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014-2018 Terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami Peningkatan walaupun hanya kecil kontribusinya tetapi sangat bermanfaat bagi pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang sementara ini sedang membangun daerah dengan kontribusi pajak reklame walaupun relatif masih kecil tetapi sangat menopang untuk pembangunan Daerah.

Setelah mengetahui data tentang Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah tersaji penulis akan mengadakan analisis tingkat Efektifitas Pajak Reklame Terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) dengan menggunakan rumus:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Target pajak Reklame}} \times 100\%$$

1. tahun 2014 =  $\frac{82.457.242}{115.000.000} \times 100\% = 71,70\%$
2. tahun 2015 =  $\frac{98.224.625}{115.000.000} \times 100\% = 85,41\%$
3. tahun 2016 =  $\frac{134.537.670}{115.000.000} \times 100\% = 116,98\%$
4. tahun 2017 =  $\frac{111.331.250}{130.000.000} \times 100\% = 85,63\%$
5. tahun 2018 =  $\frac{106.539.500}{130.000.000} \times 100\% = 81,95\%$

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan dimasukkan ke dalam tabel.

**Tabel 6.**  
**Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota tidore Kepulauan Tahun 2014-2018.**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Bentuk Rupiah)	Target Pajak Reklame (Bentuk Rupiah)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2014	82.457.242	115.000.000	71,70%	Kurang Efektif
2015	98.224.625	115.000.000	85,41%	Cukup Efektif
2016	134.537.670	115.000.000	116,98%	Sangat Efektif
2017	111.131.250	130.000.000	85,63%	Cukup Efektif
2018	106.539.500	130.000.000	81,95%	Cukup efektif

Sumber: Hasil olahan data 2021

Penerimaan Pajak Reklame di kota Tidore Kepulauan pada tahun 2014 sampai pada tahun 2018 sudah dapat dikategorikan cukup efektif, karena tingkat efektivitas yang dicapai sudah mencapai lebih dari 60% yang artinya sudah menyentuh kategori cukup efektif, dan juga pada Tahun Anggaran 2016 Tingkat efektivitas sudah mencapai angka lebih dari 100%.

### 3.3 Pembahasan

Dari data yang sudah tersaji diatas diketahui kontribusi Pajak Reklame pada tahun 2014 sampai pada tahun 2018 yaitu Rp. 82.457.242 pada tahun 2014, Rp. 98.224.625 pada tahun 2015, Rp. 134.537.670 pada tahun 2016, Rp. 111.331.250, pada 2017 Rp. 106.539.500 pada tahun 2018. Dari angka tersebut diketahui bahwa tiap tahun kontribusi Pajak Reklame mengalami pasang surut yang tidak menentu tetapi sangat bermanfaat bagi Pendapatan Daerah dan angka yang sangat mencolok bagi realisasi Pajak Reklame yaitu pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 134.537.670 dengan persentase kontribusi sebesar 0,3467%. Hal itu disebabkan oleh penerimaan Pajak Reklame yang sangat tinggi pada tahun 2016. Dari hasil penelitian bahwa kontribusi Pajak Reklame telah memberikan kontribusi dengan cukup baik terhadap Pendapatan Daerah.

Dari hasil penelitian diketahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada 2014 sampai pada tahun 2018 yaitu sebesar, 71,70% pada tahun 2014, 85,41% pada tahun 2015, 116,98% pada tahun 2016, 85,63% pada tahun 2017, 81,95% pada tahun 2018. Dari angka tersebut diketahui bahwa dari tahun 2014 sampai pada tahun 2016 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan tidak begitu jauh dari tahun-tahun sebelumnya. dari hasil di atas bisa dikatakan bahwa tingkat Efektivitas Pajak Reklame terhadap PAD Cukup Efektif. tingginya penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 disebabkan dikarenakan adanya peristiwa gerhana matahari yang tepatnya Kota Tidore menjadi titik paling sempurna terjadinya gerhana matahari dari peristiwa tersebut menjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014-2018 Cukup Baik dalam memberikan Kontribusinya.
2. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2014 – 2018 Cukup Baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agita, N. 2008. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. [https://repository.usd.ac.id/1814/2/022114138\\_Full.pdf](https://repository.usd.ac.id/1814/2/022114138_Full.pdf). Diakses pada 18 April 2021.
- Christian F, M. (2018). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung, bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD kota Bitung. *Jurnal Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21102>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Djoko Muljono, 2010, HUKUM PAJAK konsep, Aplikasi dan pemngutan praktis, Yogyakarta.
- Handoko P, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1406>. Diakses pada Tanggal 18 April 2021.
- Henni, A. 2019. Analisis Penerimaan Pajak Reklame Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *UMSU Research Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6017>. Diakses pada 18 April 2021
- Irsan Lubis, 2015. Mahir Akuntansi Pajak Terapan, Berbasis Standar Akuntansi dan Ketentuan Pajak Terbaru. Yogyakarta..
- J, Manderos., I, Elim., L, Mawikere (2019). Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba*. Vol.7 No.3 Juli 2019, Hal. 3568–3577. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24801/24509>. Dikases pada 20 April 2021.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo, (2019), *Perpajakan Edisi 2019*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta, Andi
- N, L, P, Anggraini. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21100>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Peraturan Kota Tidore Kepulauan Nomor 58 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota tidore Kepulauan
- Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Pinkan G, A. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode (2013-2017). *Jurnal Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21866/21562>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Ratu, I. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Sulawesi Utara. *Jurnal Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20174>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- R, Kobandaha., Heince R. N. (2016) Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Emba*. Vol.4 No.1, Hal. 1461-1472. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Soemarso, (2015), Pengantar Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5. Salemba Empat.
- Thressa, R, P. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Going Concern*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20050>. Diakses pada 20 Desember 2021.
- Wahyuni, E. T., Verawaty. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal GCA-4*. 1947-1958. <http://eprints.binadarma.ac.id/4160/>. Diakses pada 20 Desember 2021.